

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PADA LAPORAN KEUANGAN DINAS PUPR
KABUPATEN KUDUS**

**Laporan Akhir Magang MB-KM
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1 Akuntansi**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :
Habibah Inas Cahyani
NIM : 31401900072**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR MAGANG MB-KM

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA PADA LAPORAN KEUANGAN DINAS
PUPR KABUPATEN KUDUS**

Disusun Oleh :

Habibah Inas Cahyani

Nim : 31401900072

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian **Skripsi**
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 19 Januari 2023

UNISSOLA
جامعته سلطان بن أبي العاصم الإسلامية
Pembimbing,

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Supervisor

Drs. Osmad Mutaher, M.Si

NIK. 210403050

Diyah Winarni, SE., MM

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN AKHIR MAGANG MB-KM

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA LAPORAN KEUANGAN DINAS PUPR KABUPATEN KUDUS

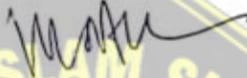
Disusun Oleh :

Habibah Inas Cahyani

Nim : 31401900072

Telah dipertahankan di depan penguji Pada tanggal 10 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji
Dosen Pembimbing Lapangan


Drs. Osmad Muta'her, M.Si
NIK. 210403050

Penguji I


Dr. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA,
AK, CA

NIDN : 06030-16301

Penguji II


Dr. H. M. W'far Shodiq, SE, S.Si,
M.Si, Ak, CA, CSRA, CSRS

NIDN : 0612026802

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana S1 Akuntansi tanggal 10 Februari 2023

UNISSULA
Ketua Program Studi S1 Akuntansi


Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA

NIDN : 06110880001

LEMBAR PERNYATAN
LAPORAN MAGANG MB-KM

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Habibah Inas Cahyani

NIM : 31401900072

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan Laporan MB-KM berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Laporan keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam laporan magang ini telah dikutip sesuai dengan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti laporan magang ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 15 Agustus 2022

Yang Menyatakan

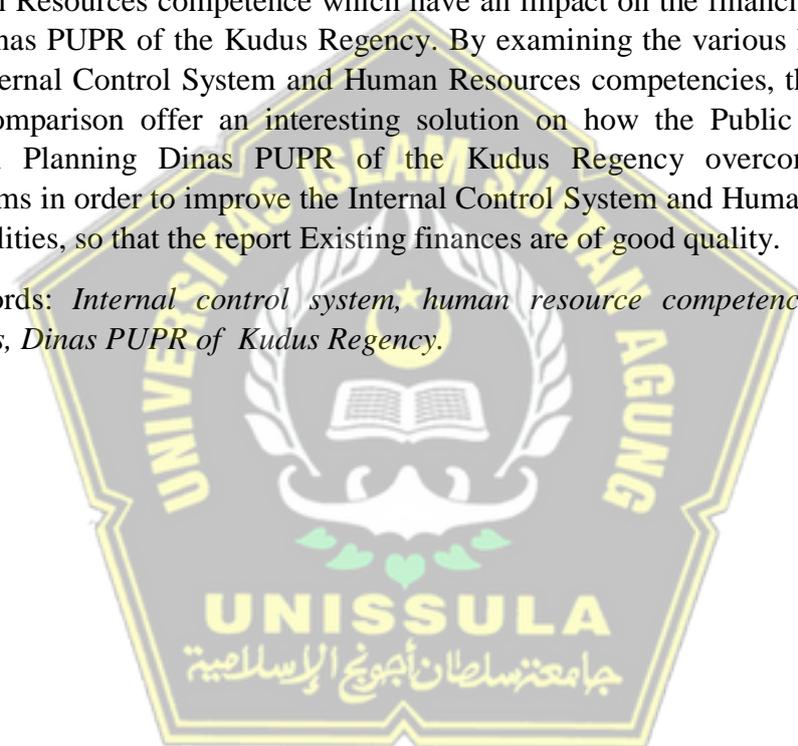


Habibah Inas Cahyani

ABSTRACT

Analysis of Internal Control Systems and Human Resource Competence in the Financial Reports of the Dinas PUPR of Kudus Regency. This MB-KM Internship Report is intended to find out how the Internal Control System and Human Resources competence have an impact on the financial reports of the Dinas PUPR of Kudus Regency. For this purpose, observations and data collection have been carried out during a 5-month internship at the Dinas PUPR of the Kudus Regency. Theoretical studies have been carried out by explaining the various problems encountered related to the Internal Control System and Human Resources competence which have an impact on the financial reports of the Dinas PUPR of the Kudus Regency. By examining the various literature on the Internal Control System and Human Resources competencies, the results of this comparison offer an interesting solution on how the Public Works and Spatial Planning Dinas PUPR of the Kudus Regency overcome existing problems in order to improve the Internal Control System and Human Resources capabilities, so that the report Existing finances are of good quality.

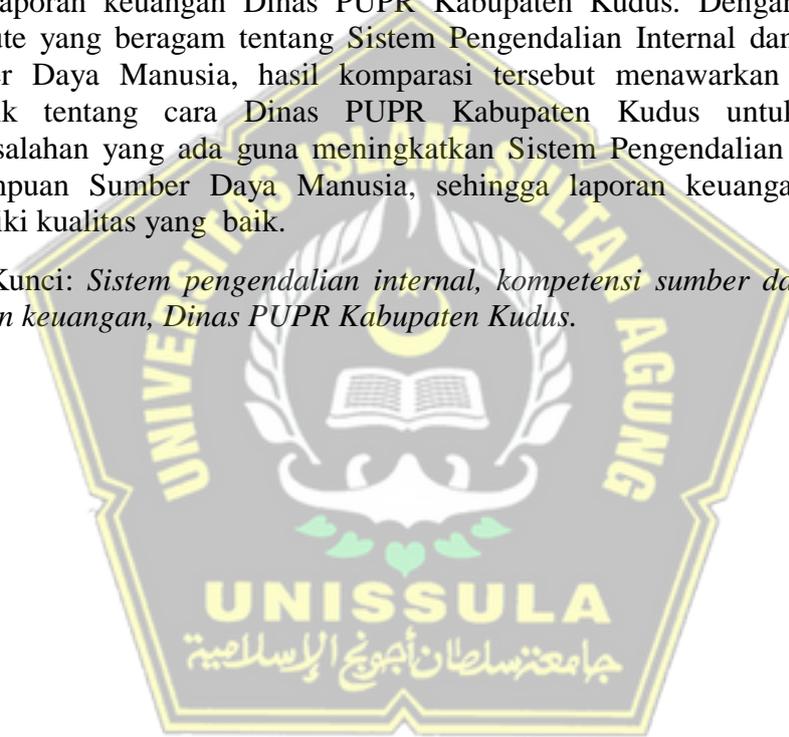
Keywords: *Internal control system, human resource competence, financial reports, Dinas PUPR of Kudus Regency.*



ABSTRAK

Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Laporan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Laporan Magang MB-KM ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Internal dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang berdampak pada laporan keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Untuk keperluan tersebut, pengamatan dan pengumpulan data telah dilakukan selama 5 bulan magang di Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Kajian teori telah dilakukan dengan menjelaskan berbagai masalah yang ditemui terkait dengan Sistem Pengendalian Internal dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang berdampak pada laporan keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Dengan memeriksa literatur yang beragam tentang Sistem Pengendalian Internal dan kompetensi Sumber Daya Manusia, hasil komparasi tersebut menawarkan solusi yang menarik tentang cara Dinas PUPR Kabupaten Kudus untuk mengatasi permasalahan yang ada guna meningkatkan Sistem Pengendalian Internal dan kemampuan Sumber Daya Manusia, sehingga laporan keuangan yang ada memiliki kualitas yang baik.

Kata Kunci: *Sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, laporan keuangan, Dinas PUPR Kabupaten Kudus.*



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang MB-KM dengan Judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Laporan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus”.

Laporan magang ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus. Penulisan laporan magang ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyelesaikan laporan magang ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada

1. Allah SWT, Allah Maha Kuasa yang mana telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam proses pembuatan laporan magang ini.
2. Prof. Dr. Heru Sulisty, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si selaku ketua program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Drs. Osmad Mutaher, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan magang ini.
5. Ibu Diyah Winarni, SE, MM., yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian serta segenap karyawan yang bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Kudus yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan.
6. Ayah dan bundaku tersayang, yang telah memberikan doa dan dukungan, semangat, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak ternilai dengan apapun.
7. Semua pihak yang telah mendukung dan berperan aktif dalam penulisan laporan magang ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulis dalam penyusunan laporan magang ini. Semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 15 Agustus 2022

Penyusun



Habibah Inas Cahyani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAN.....	ii
ABSTRACT.....	iiv
ABSTRAK.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang.....	1
1.2 Sistematika Business Cases Report Magang MB-KM.....	8
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	10
2.1 Profil Organisasi.....	10
2.2 Aktivitas Magang.....	18
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH.....	22
3.1 Sistem Pengendalian Internal.....	22
3.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	23
BAB IV KAJIAN PUSTAKA.....	26
4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
4.2 Sistem Pengendalian Internal.....	27
4.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	30
4.4 Hubungan SPI dan Kompetensi SDM pada Laporan Keuangan.....	32
BAB V METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA.....	34
5.1 Sumber Data.....	34

5.2 Metoda Pengumpulan Data	35
5.3 Analisis Data	36
5.4 Teknik Analisis data	36
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	39
6.1 Analisis	39
6.1.1 Sistem Pengendalian Internal.....	39
6.1.2 Dampak Pengendalian Internal pada Dinas PUPR Kab. Kudus	46
6.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	51
6.2 Pembahasan	55
6.2.1 Identifikasi Penyelesaian.....	55
6.2.2 Strategi Penyelesaian	56
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	61
7.1 Kesimpulan.....	61
7.2 Rekomendasi.....	62
7.2.1 Rekomendasi Hasil Analisis	62
7.2.2 Hal-hal yang Perlu Diperbaiki Organisasi Tempat Magang	64
7.2.3 Hal-hal yang Perlu Diperbaiki oleh Program Studi	65
BAB VIII REFLEKSI DIRI.....	66
8.1 Hal Positif Selama Perkuliahan yang Bermanfaat Selama Magang	66
8.2 Manfaat Magang Terhadap Pengembangan Softskill Mahasiswa.....	66
8.3 Manfaat Magang Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa.....	67
8.4 Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang	67
8.5 Rencana Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan Mahasiswa	67
DAFTAR REFERENSI	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hasil Opini Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021	2
Tabel 1. 2 Jenjang Pendidikan Bendahara Dinas PUPR Kab. Kudus	6
Tabel 3. 1 Jenjang Pendidikan Bendahara Dinas PUPR Kab. Kudus	23
Tabel 6. 1 Hasil Opini Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2017-2012	48
Tabel 6. 2 Pelayanan Perizinan Pembangunan	50
Tabel 6. 3 Jenjang Pendidikan Bendahara Dinas PUPR Kudus.....	52
Tabel 6. 4 Strategi mengatasi permasalahan terkait SPI.....	57
Tabel 6. 5 Strategi mengatasi permasalahan terkait SDM.....	59



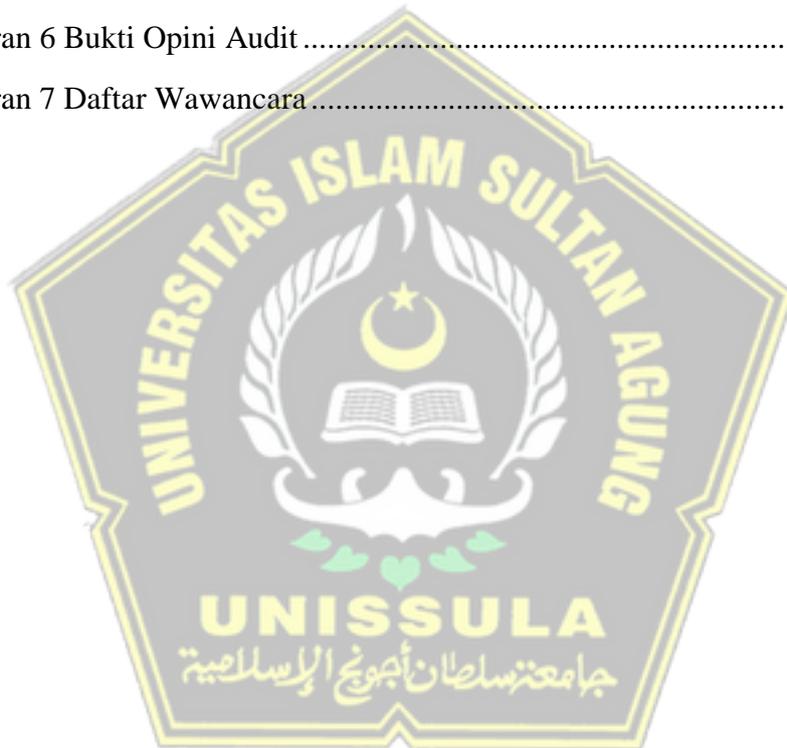
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kab. Kudus.....	12
Gambar 5. 1 Alur Analisis Data Kualitatif	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Identitas Peserta Magang.....	73
Lampiran 2 Daftar Hadir Peserta Magang	74
Lampiran 3 Logbook Peserta Magang	82
Lampiran 4 Proses Pembimbingan Peserta Magang oleh DPL	92
Lampiran 5 Proses Pembimbingan Magang oleh Dosen Supervisor	94
Lampiran 6 Bukti Opini Audit	96
Lampiran 7 Daftar Wawancara.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang

Laporan keuangan menjadi hal yang penting karena, sebagai bentuk tanggung jawab kinerja tertentu yang terukur dan sebagai bentuk komunikasi perusahaan atau instansi. Sehingga para pengguna laporan dapat dengan mudah memahaminya dan memiliki informasi yang cukup, serta disajikan secara wajar dan jujur. Berdasarkan IASB (International Accounting Standard Board) tentang Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat berguna bagi penyedia modal, sehingga mereka dapat membuat keputusan dalam menyediakan modal. (Lutfiati, 2021).

Penyusunan laporan keuangan pada perusahaan sektor publik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan menggunakan prinsip pengelolaan tepat waktu (Triono, 2020). Selain itu, untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik, maka pemeriksaan laporan keuangan juga perlu dilakukan, yaitu dengan adanya audit pada laporan keuangan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, wilayah Kabupaten Kudus mendapat predikat opini WTP selama 10 kali sampai tahun 2021 dengan mencantumkan hasil opini selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Hasil Opini Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021			Target Akhir 2021	Capaian selama 5 tahun terakhir
					Target	Realisasi	Capaian		
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%

Pencapaian atas sasaran meningkatnya nilai laporan keuangan daerah tercapai sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari indikator nilai opini BPK yang menunjukkan opini terbaik (WTP). Ketika pernyataan seperti itu dibuat atas laporan keuangan, itu berarti auditor memiliki kepercayaan berdasarkan bukti audit yang dikumpulkan dengan mengambil sample dari masing-masing OPD Kabupaten Kudus, dan apabila terdapat kesalahan, hal tersebut dianggap tidak material dan tidak mempengaruhi secara signifikan dalam pengambilan keputusan.

Walaupun demikian dengan hasil opini WTP yang diberikan oleh BPK masih ditemukan beberapa temuan yang harus diperbaiki. Dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Kudus mendapat koreksi lebih lanjut pada laporan fisik dilapangan, seperti penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai, yaitu adanya perbedaan informasi atas luas tanah jalan berdasarkan SK Jalan Tahun 2015 dengan KIB A Dinas PUPR, terdapat bangunan yang dicatat dengan nilai tidak wajar dan belum tercatat di KIB C, Aset jalan untuk tambahan ruas jalan berdasarkan SK Jalan Tahun 2015 sebagian belum dicatat dalam KIB D dan jumlah jembatan yang berbeda dengan database jembatan.

Selain itu juga BPK memberikan penekanan atas suatu hal tentang aset lainnya masih harus dilengkapi dengan bukti-bukti penyerahan aset secara tertulis yaitu adanya aset sumur dan jaringan air bersih yang berlokasi di masyarakat, tetapi belum adanya bukti secara tertulis dalam penyerahan aset tersebut.

Selanjutnya, dalam sebuah perusahaan atau instansi perlu diterapkan sistem pengendalian internal, hal itu berfungsi agar meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat berdampak pada opini BPK. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlunya pemisahan tugas pegawai dan sistem otorisasi (Triono, 2020).

Akuntabilitas dan transparansi ini merupakan bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Dalam hal ini, publik akan lebih percaya kepada pemerintah yang secara terbuka didalam menyampaikan informasi keuangan daripada pemerintah yang relaif tertutup.

Laporan keuangan merupakan hal penting bagi sebuah instansi atau perusahaan didalam menyediakan informasi yang terkait dengan kondisi keuangan dan kinerja instansi. Hal tersebut sangat berguan bagi pengguna informasi dalam pengambilan keputusan dan melakukan evaluasi terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, pengendalian intern diperlukan untuk mengendalikan dan mengawasi dalam pembuatan laporan keuangan.

Pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus yaitu suatu lembaga yang bergerak dalam bidang jasa sebagai pemenuhan sarana prasarana infrastruktur Kabupaten Kudus, pengendalian internal ini harus diterapkan dan perlu dikembangkan dalam pelaksanaannya. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal pada dinas diperlukan untuk mengontrol keakuratan dan kebenaran akuntansi dan untuk mendorong efisiensi dan menegakkan praktik manajemen yang telah ditetapkan, salah satu tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

Pada SKPD untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah maka aplikasi seperti SIMDA ini sangat diperlukan didalam melakukan perencanaan anggaran, pengelolaan kas dan pelaporan keuangan. Penerapan aplikasi SIMDA ini dilakukan dengan memperhatikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan begitu, akan memudahkan didalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah guna menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara lengkap dan menyeluruh.

Oleh sebab itu, ketika aplikasi SIMDA ini mengalami kendala maka pengendalian terhadap aplikasi tersebut juga menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan agar proses input dalam laporan keuangan tidak tertunda dan dapat terselesaikan tepat waktu (Yanto, 2020). Pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus, permasalahan yang timbul terkadang aplikasi SIMDA mengalami

error atau tidak dapat digunakan yang menjadikan terhambatnya proses penginputan data.

Selain pengendalian internal terdapat factor penting lainnya yaitu sumber daya manusia dengan meningkatkan kompetensi pegawai di suatu instansi tersebut. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam hal keuangan, Dinas PUPR Kabupaten Kudus didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 10 pegawai yang mempunyai tugas sebagai bendahara dari total pegawai secara keseluruhan sebanyak 147 orang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jenjang Pendidikan Bendahara Dinas PUPR Kab. Kudus

No	Uraian	Jenjang Pendidikan
1.	Bendahara Pengeluaran	S1 Akuntansi
2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu BM	SMA
3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu SDA	SMK
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat	SMK Akuntansi
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu PRP	D3 Management
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu TBD	SMA
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Wilayah I	SMA
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Wilayah II	STM
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu SAB	S1 Hukum
10.	Bendahara Gaji	SMA

Sumber Data: Dinas PUPR Kabupaten Kudus

Dari tabel yang telah disajikan, dapat terlihat bahwa jenjang pendidikan pegawai yang memiliki tugas sebagai bendahara di Dinas PUPR Kabupaten Kudus berasal dari lulusan yang berbeda-beda dan kurangnya Sumber Daya Manusia lulusan akuntansi ini menjadi salah satu persoalan dalam Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan.

Permasalahan ini dapat terlihat pada keterlambatan dalam penyetoran pajak, yang diakibatkan karena bendahara pembantu per bidang terlambat didalam menyertakan kode billing (ID Billing) pajak ke bendahara pengeluaran dinas. Selain itu, keterlambatan tersebut dapat terlihat juga pada saat bendahara pembantu per bidang terlambat dalam penyerahan Buku Kas Umum (BKU) ke bendahara pengeluaran dinas. Sehingga mengakibatkan Uang Persediaan (UP) menjadi tertunda.

Kurangnya ketelitian pegawai juga dapat menjadi permasalahan dalam suatu pekerjaan, hal ini dapat terlihat ketika bendahara pembantu per bidang yang terkadang salah menginput kode digit rekening. Hal ini menjadikan kesalahan dalam proses transfer ke bank. Risiko atau dampak yang terjadi apabila hal ini tidak segera mendapat koreksi maka akan mengakibatkan laporan keuangan menjadi tertunda.

Jika masalah yang muncul tidak diselesaikan dengan baik, kemungkinan masalah akan meningkat dan mempengaruhi seluruh sistem operasi dan

akuntansi pada instansi. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan solusi yang tepat, paling tidak untuk meminimalkan resiko yang terjadi.

Dengan demikian untuk menjamin terlaksananya setiap kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Kudus, maka pengendalian internal ini sangat dibutuhkan agar suatu organisasi atau instansi tetap bisa beroperasi dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Serta SDM yang ada harus selalu dilakukan pengawasan, pelatihan dan pengendalian karena SDM dalam sektor publik menjadi komponen utama dalam melaksanakan semua kegiatan perusahaan. Terlebih khususnya dalam proses akuntansi dalam hal pembuatan laporan keuangan yang menjadi hal utama untuk proses pertanggungjawaban.

Tujuan dari proses magang yang dilakukan adalah untuk mendapatkan pengalaman secara langsung mengenai proses akuntansi pada perusahaan sektor publik, menemukan permasalahan dan mendapatkan solusi berdasarkan teori dari permasalahan tersebut. Kemudian dari permasalahan yang ada, akan di kaji lebih lanjut untuk mendapatkan solusi terbaik berdasarkan teori yang ada dan nantinya solusi yang dihasilkan akan diberikan kepada instansi untuk diterapkan.

1.2 Sistematika Business Cases Report Magang MB-KM

Penjelasan mengenai sistematika didalam penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini, masalah dan tujuan magang dijelaskan secara lebih umum dan menjelaskan mengenai sistematika laporan magang.

2. Bab II Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

Menjelaskan tentang profil organisasi tempat magang dan kegiatan yang dilakukan selama proses magang.

3. Bab III Identifikasi Masalah

Melakukan identifikasi permasalahan yang ada di tempat magang untuk dipecahkan.

4. Bab IV Kajian Pustaka

Menguraikan teori-teori yang relevan yang digunakan dalam pembahasan mengenai masalah penting yang dipilih.

5. Bab V Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

Menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi dari dinas PUPR Kabupaten Kudus

dalam penelitian yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis data-data yang didapatkan selama kegiatan magang.

6. Bab VI Analisis dan Pembahasan

Menguraikan kembali permasalahan yang ada di tempat magang dan menganalisis permasalahan dengan menggunakan bukti yang valid serta menjelaskan strategi yang digunakan untuk meminimalisir permasalahan tersebut.

7. Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi

Menyimpulkan kasus atau masalah yang dianalisis dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi pada organisasi tempat magang dan program studi.

8. Bab VIII Refleksi Diri

Menguraikan tentang hal-hal positif yang diterima di tempat magang, manfaat magang terhadap pengembangan soft skill, manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif. Kemudian menjelaskan mengenai kunci keberhasilan kerja dalam pengalaman magang yang dilakukan, perbaikan/pengembangan diri, rencana karir dan pendidikan selanjutnya.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

2.1.1 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus (Dinas PUPR) adalah instansi pemerintah daerah yang berada di bawah sekretaris daerah Kabupaten Kudus dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dinas PUPR Kabupaten Kudus dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertugas melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang daerah. Dinas PUPR Kabupaten Kudus berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 182, Rendeng, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Sejarah awal berdirinya Dinas PUPR Kabupaten Kudus yaitu sebelum tahun 2001 bernama kantor Dinas pengairan Mulya Barat yang hanya menangani pengairan, kemudian pada tahun 2001 sampai 2009 bernama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus yang menangani jalan, jembatan, irigasi, dan pekerjaan umum, selanjutnya pada tahun 2009 sampai 2017 bernama Dinas Bina Marga Pengairan Sumber Daya Mineral dengan menangani 3 urusan yaitu bina marga, pengairan, dan energi sumber daya mineral, dan pada tahun 2017 sampai sekarang bernama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang yang menangani urusan pekerjaan umum meliputi,

bina marga, pengairan, tata bangunan, dan penataan ruang nya. Perubahan nama tersebut dikarenakan adanya kebijakan yang baru dari presiden.

2.1.2 Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Pembentukan kebijakan teknis daerah dan menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pelayanan dalam bidang bina marga, pengairan, energi, dan sumber daya mineral ;
2. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas serta melakukan kontrol, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, pengairan, energi, dan sumber daya mineral ;
3. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3 Visi dan Misi Dinas

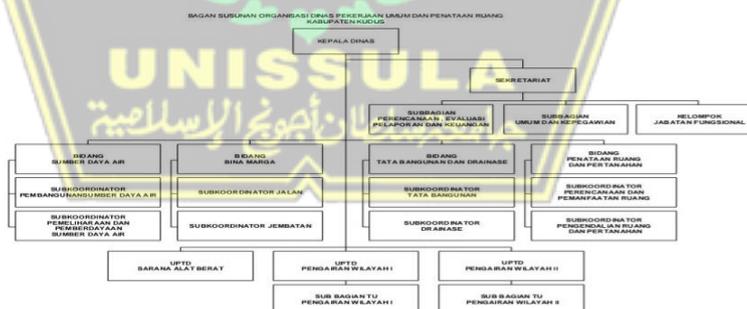
Adapun Visi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang kabupaten Kudus adalah sebagai Berikut: *“Terwujudnya Infrastruktur yang Mantap”*.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang kabupaten Kudus dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi antara lain sebagai berikut :

1. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana kerja yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang professional
2. Memenuhi kebutuhan infastruktur Bidang Bina marga,dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa
3. Memenuhi kebutuhan infastruktur Sumber daya air, termasuk mendukung ketahanan Pangan melalui pengembangan jaringan Irigasi serta Pengembangan Jaringan Irigasi serta mengamankan pusat Produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air

2.1.4 Struktur Organisasi dan Kelembagaan Struktur Organisasi

1) Struktur Organisasi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kab. Kudus

2) Kelembagaan Struktur Organisasi

Uraian mengenai kelembagaan struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Kudus, yaitu :

1. Kepala Dinas;

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Merancang dan mengatur kebijakan teknis daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus
- b. Pengkoordinasian perumusan sekaligus menjadi pelaksana kebijakan program dan kegiatan yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Kudus.
- c. Melakukan pengendalian dan pelaporan serta melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat,

Sekretariat sebagai penyelenggara bidang pelayanan dalam hal menyiapkan agenda kegiatan, urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, organisasi serta tata usaha pada lingkungan dinas.

3. Bidang Bina Marga,

Bidang BM bertugas sebagai penyelenggaraan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang lainnya.

4. Bidang SDA (Sumber Daya Air),

Bidang SDA memiliki tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi dan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).

5. Bidang TBD (Tata Bangunan dan Drainase),

Bidang TBD bertugas melakukan kebijakan teknis daerah yang berkaitan dengan tata bangunan dan gedung serta sistem drainase.

6. Bidang PRP (Penataan Ruang dan Pertahanan),

Tugas Bidang PRP adalah melakukan pengelolaan penataan ruang dan lahan serta pemberian izin lokasi.

7. UPTD Pengairan

- a) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD Pengairan berada di daerah;
 - UPTD Pengairan Wilayah I meliputi Kecamatan Jekulo, Mejobo, Dawe, Bae, Gebog, dan Kaliwungu

- UPTD Pengairan Wilayah II meliputi Kecamatan Kota Jati dan Undaan;
- b) UPTD Pengairan mempunyai fungsi teknis operasional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

8. UPTD Sarana Alat Berat

UPTD Sarana Alat Berat merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang berkaitan dengan pengelolaan alat berat.

2.1.5 Gambaran Umum Mengenai Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas PUPR Kabupaten Kudus

a. Sistem Pengendalian Internal

Dinas PUPR Kabupaten Kudus didalam melakukan pengendalian internal yaitu melalui verifikator dan melalui aplikasi SIMDA. Melalui verifikator ini berkas dari bendahara pengeluaran pembantu diverifikator oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya melalui PPTK dan PPK.

PPTK merupakan kasi yang mengampu kegiatan dan ikut didalam pemeriksaan ulang berkas sebelum berkas tersebut diberikan tanda tangan. Kemudian untuk ppk yaitu setingkat dengan sekretaris dinas yang memiliki tugas memeriksa berkas

dari bendahara pengeluaran dinas. Kemudian didalam pengendalian melalui aplikasi SIMDA yaitu dengan menginput data yang dibutuhkan. Jadi saat proses input ke SIMDA bisa ketahuan kalau ada dana yang tidak cukup ataupun kesalahan pada kode rekening,

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dinas PUPR Kabupaten Kudus didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 147 orang dan untuk mendukung didalam pengelolaan keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus masing-masing bidang dibantu oleh bendahara. Jadi untuk Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas sebagai bendahara ada 10 pegawai.

2.1.6 Proses Bisnis atau Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Kudus

Dalam proses pelayanan yang dilakukan, Dinas PUPR Kabupaten Kudus yang merupakan salah satu perangkat daerah mempunyai peranan penting dalam menyediakan infrastruktur daerah. Dalam hal ini proses pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan manfaat yang nyata dan mempunyai dampak yang luas dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa program pembangunan yang dilaksanakan yang terbagi ke dalam 4 (empat) sektor yakni sektor prasarana jalan dan jembatan, sektor SDA, TBD serta PRP.

Dalam proses pelayanan jalan dan jembatan, yang merupakan infrastruktur pokok dalam transportasi darat, Dinas PUPR Kabupaten Kudus selalu berupaya dalam meningkatkan infrastruktur yang memadai sehingga sangat membantu aksesabilitas dan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan selalu melakukan kontrol pada jalan yang diperbaiki dan meninjau langsung perbaikan jalan.

Selanjutnya keberadaan sarana dan prasarana irigasi ini terkait dengan ketersediaan sumber daya air, yang memiliki nilai yang sangat strategis dalam pembangunan wilayah Kabupaten Kudus, terutama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, penyediaan air bersih di pemukiman, industri, pariwisata, dan lain sebagainya. Hal ini selalu dilakukan dengan tindakan pemeliharaan, agar lahan pertanian dapat diairi secara optimal. Kemudian daerah irigasi yang rusak ringan dan berat ditata untuk diperbaiki kondisinya guna meningkatkan ketersediaan air irigasi.

Kemudian dalam sektor TBD dan PRP Dinas PUPR Kabupaten Kudus terdapat layanan SISKATARU, yang merupakan sistem informasi Kajian Tata Ruang di Kabupaten Kudus. Melalui sistem ini masyarakat sebagai pengguna layanan dapat lebih mudah dalam mengakses segala informasi kajian tata ruang serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Aktivitas Magang

2.2.1 Deskripsi Kegiatan Magang

Pelaksanaan Magang MB-KM di Dinas PUPR Kabupaten Kudus selama 1 (satu) semester ini telah berjalan sesuai dengan proposal dan surat izin yang sebelumnya diajukan kepada Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Kegiatan Magang MB-KM yang dilaksanakan selama 1 (satu) semester ini terhitung sejak tanggal 14 Februari – 18 Juni 2022. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak PUPR Kabupaten Kudus, kemudian diarahkan untuk menempati bidang Sekretariat PEP (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan).

2.2.2. Penjelasan Kegiatan Magang

Jadwal kegiatan magang di Dinas PUPR Kabupaten Kudus :

- a. Masuk Pukul 07.00 WIB setiap hari Senin-Kamis dan Pukul 06.30 WIB setiap hari Jumat.
- b. Istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB
- c. Pulang pukul 15.15 WIB setiap hari Senin-Kamis dan pukul 11.00 WIB Setiap hari Jumat

Didalam proses magang tidak terlepas dari tugas pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Ruang Sekretariat PEP selama magang berlangsung. Dalam hal ini tugas yang diberikan yaitu *pada bulan*

Februari dengan membuat laporan penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan memerinci setiap akun di neraca. Selain itu juga memerinci LO dan LPE per 31 Desember 2022. Selanjutnya melakukan pengarsipan laporan keuangan selama tahun 2021, yang selanjutnya akan dilakukan koreksi oleh bendahara pengeluaran sebelum nantinya diserahkan ke BPK.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan *pada bulan Maret* yaitu menginput data realisasi rencana kinerja pegawai melalui aplikasi E-SAKIP pada sub kegiatan tahun anggaran 2021; merekap saldo awal, panjar tunai dan BIBS pada BKU (Buku Kas Umum) serta cross check pengeluaran secara tunai pada setiap bidang di Dinas PUPR Kabupaten Kudus yang meliputi bidang BM, PRP, SDA, Sekretaris dan UPT. Kemudian melakukan analisis pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan pada Dinas PUPR dan membuat rincian kegiatan dan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta selalu melakukan arsip dokumen pada bulan Maret.

Untuk selanjutnya kegiatan yang dilakukan *pada bulan April dan Mei* yaitu melakukan cross check data perjanjian kontrak pada Bidang TBD (Tata Bangunan dan Drainase) yang meliputi pembangunan gedung dan pembangunan jembatan. Hal ini dilakukan agar data kontrak yang diajukan ke Dinas PUPR sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya melakukan cross check bukti pengeluaran kas dan pengajuan cek serta mengarsipkannya.

Kemudian kegiatan yang dilakukan *pada bulan Juni*, yaitu melakukan Cross Check selisih pada laporan keuangan, merekap dana anggaran pada data fisik bangunan, cross check pergeseran anggaran tahun 2022, cross Check perjanjian kontrak bidang TBD (Tata Bangunan dan Drainase) dan Bidang BM (Bina Marga) serta melakukan pengarsipan setiap dokumen pada bulan Juni.

Tujuan dari dilakukannya pengarsipan dokumen setiap bulan adalah untuk menunjang setiap aktivitas administrasi, sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan dan agar data yang sudah ada dapat tersusun dengan baik, teratur dan aman serta lebih mudah ditemukan kembali jika dokumen tersebut dibutuhkan. Selanjutnya untuk mendapatkan permasalahan yang ada Dinas PUPR Kabupaten Kudus yaitu dengan melakukan wawancara kepada Kepala Ruang Sekretariat PEP dan Bendahara Pengeluaran.

Untuk kegiatan yang lain yang berhubungan dengan pelaksanaan magang yaitu ketika hari besar mengikuti serangkaian kegiatan di Dinas PUPR seperti tiap pagi selalu mengikuti apel rutin dan pada saat hari kartini mengikuti upacara dan setiap hari jumat mengikuti jalan santai ataupun senam. Kegiatan magang yang

dilakukan selalu mendapatkan ilmu yang baru dengan tugas yang berbeda-beda setiap harinya. Sehingga dapat menyerap ilmu yang diberikan dari Bidang Sekretariat PEP sebanyak yang bisa saya terima dengan berbagai tugas yang ada dan berbeda setiap harinya.



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam penjelasan kali ini akan dibahas mengenai permasalahan pada Dinas PUPR Ruang Kabupaten Kudus. Adapun permasalahan tersebut ditemukan dari hasil temuan pada opini BPK dan keterbatasan sumber daya manusia, yaitu dijelaskan sebagai berikut :

3.1 Sistem Pengendalian Internal

Permasalahan pada SPI ini dapat terlihat dari data hasil pemeriksaan BPK. Walaupun didalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mendapatkan hasil WTP, namun dalam hal ini masih adanya temuan yang harus diperbaiki. Temuan tersebut antara lain mengenai :

- 1) Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai, yaitu adanya perbedaan informasi atas luas tanah jalan berdasarkan SK Jalan Tahun 2015 dengan KIB A Dinas PUPR, terdapat bangunan yang dicatat dengan nilai tidak wajar dan belum tercatat di KIB C, Aset jalan untuk tambahan ruas jalan berdasarkan SK Jalan Tahun 2015 sebagian belum dicatat dalam KIB D dan jumlah jembatan yang berbeda dengan database jembatan.
- 2) Aset lainnya belum didukung bukti penyerahan aset secara tertulis, yaitu adanya aset sumur dan jaringan air bersih yang berlokasi di masyarakat, tetapi belum adanya bukti secara tertulis dalam penyerahan

aset tersebut. Padahal bukti secara tertulis tersebut sangat diperlukan untuk bisa dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban dengan adanya isi dokumen yang detail dan disahkan dengan tanda tangan pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya kelemahan Sistem Pengendalian Internal ini juga dapat terlihat dari aplikasi SIMDA yang mengalami eror atau tidak dapat digunakan yang diakibatkan karena jaringan internetnya kurang stabil sehingga proses input laporan keuangan menjadi tertunda dan tidak terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, pengendalian terhadap aplikasi tersebut harus diperhatikan dengan lebih lanjut.

3.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keterbatasan kompetensi SDM dalam Dinas PUPR Kabupaten Kudus dapat terlihat pada data mengenai jenjang pendidikan masing-masing bendahara yang ada di dinas, yaitu:

Tabel 3. 1 Jenjang Pendidikan Bendahara Dinas PUPR Kab. Kudus

No	Uraian	Jenjang Pendidikan
1.	Bendahara Pengeluaran	S1 Akuntansi
2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu BM	SMA
3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu SDA	SMK
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat	SMK Akuntansi
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu PRP	D3 Management

6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu TBD	SMA
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Wilayah I	SMA
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Wilayah II	STM
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu SAB	S1 Hukum
10.	Bendahara Gaji	SMA

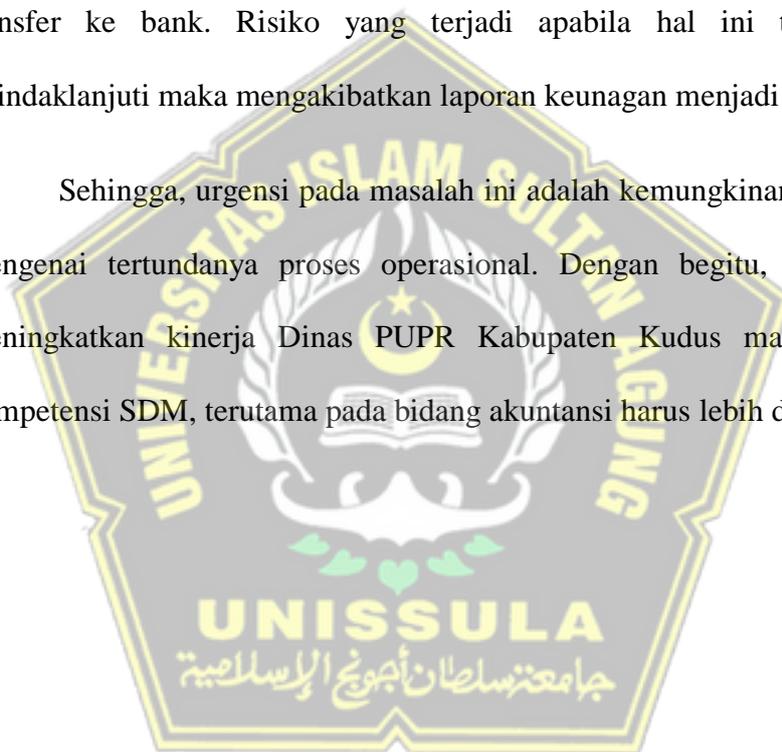
Sumber Data: Dinas PUPR Kabupaten Kudus

Dari tabel yang telah disajikan, dapat terlihat bahwa jenjang pendidikan masing-masing bendahara per bidang berbeda-beda. Permasalahan yang timbul akibat keterbatasan SDM tersebut dapat dilihat pada saat bendahara pembantu per bidang mengalami keterlambatan dalam menyertakan kode billing (ID Billing) pajak ke bendahara pengeluaran dinas hal tersebut menimbulkan keterlambatan dalam penyetoran pajak karena tidak dapat menginput data ke aplikasi SIMDA untuk proses pembayaran pajaknya.

Selain itu, keterlambatan juga dapat terlihat ketika bendahara pembantu per bidang terlambat menyerahkan Buku Kas Umum ke bendahara pengeluaran. Hal ini mengakibatkan Uang Persediaan (UP) menjadi tertunda. Padahal UP tersebut sangat penting bagi sebuah instansi pemerintahan karena UP merupakan sumber modal perusahaan setiap perangkat daerah. Apabila UP tersebut tertunda maka menjadikan proses operasional menjadi tertunda.

Kemudian, permasalahan yang dapat timbul karena keterbatasan SDM ini yaitu pegawai yang terkadang kurang teliti dalam menjalankan pekerjaan, padahal untuk bidang akuntansi atau pegawai yang mempunyai tugas sebagai bendahara ketelitian sangat diperlukan agar terhindar dari sebuah kesalahan. Kurangnya ketelitian ini terlihat pada saat bendahara pembantu per bidang salah menginput kode digit rekening dalam proses transfer ke bank. Risiko yang terjadi apabila hal ini tidak segera ditindaklanjuti maka mengakibatkan laporan keuangan menjadi tertunda.

Sehingga, urgensi pada masalah ini adalah kemungkinan yang tinggi mengenai tertundanya proses operasional. Dengan begitu, untuk dapat meningkatkan kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus maka SPI dan kompetensi SDM, terutama pada bidang akuntansi harus lebih ditingkatkan.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Informasi keuangan yang meliputi pembiayaan, belanja, dan investasi serta berbagai kegiatan pemerintah disajikan dalam laporan keuangan daerah. Tanggung jawab dan transparansi mendukung penyelenggaraan pemerintahan tanpa penyimpangan. Hal tersebut dapat terjadi apabila pimpinan daerah memiliki tanggungjawab atas pengelolaan dana yang ada. Dalam hal ini juga, publik membutuhkan pertanggungjawaban atas setiap uang (pajak) yang dikeluarkan dalam membiayai pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Panggabean, 2019).

Dengan begitu dalam penyusunan laporan keuangan, pihak internal (Dewan Pengawas dan DPRD) dan eksternal (kreditur, investor, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya) memiliki tanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan kepada publik. (Panggabean, 2019).

Untuk meningkatkan laporan keuangan maka harus memahami karakteristik kualitas laporan keuangan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, kualitas pelaporan keuangan memiliki 4 (empat) karakteristik yaitu (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan dan (4) Dapat dipahami (Herawati, 2022).

4.2 Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008, mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai sebuah proses untuk memastikan kegiatan operasional sebuah instansi berjalan secara efektif dan memastikan kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan undang-undang. SPIP ini dijalankan oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang ada di pemerintahan (Arfiansyah, 2020).

SPIP dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi sebagai bagian dari pengawasan dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Keberadaan sistem kontrol bukan hanya upaya merancang mekanisme administrasi, tetapi upaya untuk mengubah sikap dan perilaku pemerintah daerah. Peraturan yang dikeluarkan adalah awal dari tindakan perbaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan SPIP sangat tergantung pada komitmen, keteladanan dan niat baik dari setiap pengelola OPD dari seluruh bagian perangkat internal pemerintah daerah (Arfiansyah, 2020).

Dengan adanya pengertian tersebut, maka pada lingkungan pemerintah diterapkan unsur sistem pengendalian intern, meliputi (Herawati, 2022).

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian yang mampu menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan dapat mendorong dalam pelaksanaan SPI

secara efektif menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengendalian intern di lembaga pemerintahan.

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah yang dilakukan yaitu dengan menentukan tujuan dan sasaran yang jelas pada tingkat kegiatan yang ada di lembaga pemerintahan. Selanjutnya, lembaga pemerintahan melakukan identifikasi risiko terkait aktivitas apa yang dapat menghambat pencapaian tujuan baik internal maupun eksternal.

3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

Kegiatan pengendalian ini dilakukan untuk mengatasi risiko, sehingga dapat menetapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara efektif untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang objektif.

4. Informasi dan Komunikasi (Informasi and Communication)

Informasi dan komunikasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi kepada para pegawai terkait pekerjaan yang dilakukan yang didalamnya ada peran dan tanggungjawab terkait dengan pengendalian internal.

5. Pemantauan (Monitoring)

Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan berjalannya sistem pengendalian intern sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dapat melihat apakah perbaikan yang dilakukan sesuai dengan perkembangan yang telah dilakukan.

Kelima komponen tersebut saling terkait pada semua fungsi dan tingkatan organisasi atau lembaga. Sekalipun penerapan sistem pengendalian intern dalam organisasi dilaksanakan dengan baik, bagaimanapun baiknya sistem pengendalian intern tersebut, selalu ada kemungkinan bahwa sistem pengendalian yang sedang berjalan terkadang tidak berjalan seperti yang diharapkan karena terikat oleh batasan-batasan tertentu (Sudarmanto, 2021).

Dengan demikian, tujuan dari sistem pengendalian internal bukanlah untuk menghilangkan semua risiko yang ada, dan tidak dapat melindungi organisasi atau lembaga dari masalah yang timbul baik dari faktor manusia itu sendiri dan lingkungan tidak menguntungkan bagi perusahaan atau instansi. Oleh karena itu, pengendalian internal, dengan berbagai keterbatasannya dan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, hanya dapat membertimbangkan dengan keyakinan tertentu bahwa semua risiko telah diturunkan ke tingkat minimum yang dapat ditoleransi oleh organisasi atau pihak terkait.

4.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah seperangkat karakteristik individu yang dihasilkan dari kombinasi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dapat mengoptimalkan kinerja seseorang itu sendiri (Gasperz, 2019). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan kemampuan untuk perilaku yang berbeda dalam aktivitas yang kompleks. Diperlukan keahlian dalam berbagai bidang manajemen personalia, termasuk proses seleksi, pengembangan, perencanaan strategis dan manajemen kinerja (Aprisyah & Yuliati, 2021).

Kompetensi SDM ialah kecakapan seseorang dalam menjalankan peran dan tugasnya yang disertai dengan pengalaman, pelatihan dan pendidikan yang dimilikinya. Maka dari itu kompetensi SDM berhubungan erat dengan integrasi antara kepintaran dan karakteristik secara fisik dari individu yang dipengaruhi keturunan dan lingkungan. Adapun kinerja dari masing-masing individu didukung dengan adanya motivasi dan keinginan guna memenuhi kepuasannya sendiri (Gasperz, 2019). Berlandaskan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM yaitu kecakapan guna melaksanakan tugas yang didasari dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik setiap individu.

Hubungan antara kompetensi SDM dengan laporan keuangan menurut (Aprisyah & Yuliati, 2021) yaitu SDM dengan kompetensi dan kualitas yang memadai dalam menjalankan sistem akuntansinya akan lebih lancar dan sedikit kesalahan dibandingkan SDM yang tidak mempunyai kualifikasi yang memadai. SDM dengan kompetensi dan keahlian akuntansi yang

cukup, maka laporan keuangan yang dihasilkannya juga akan lebih baik dan berkualitas. Dengan demikian, kompetensi SDM ini sebagai dasar individu untuk menjalankan pekerjaannya sehingga kinerjanya juga akan tinggi. Dalam hal ini kompetensi tersebut digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian suatu instansi tertentu.

Untuk mendukung kompetensi SDM, diperlukan pengembangan SDM, terutama terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Pengembangan yang dimaksud yaitu sebagai upaya dalam menyiapkan aparatur agar dapat berfungsi dan bergerak sesuai dengan dinamika dalam kelembagaan pemerintahan (Iriawan, 2021).

Kemudian hal terpenting dalam upaya pengembangan ini yaitu dengan memiliki strategi yang menghasilkan gagasan yang diperlukan dalam organisasi ataupun instansi dan dapat meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, strategi sangat diperlukan dalam setiap organisasi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Strategi tersebut adalah sebagai berikut (Iriawan, 2021).

1) Rotasi jabatan

Strategi ini dilakukan dengan melibatkan pemindahan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang direncanakan dengan tujuan belajar dan mendapatkan pengalaman baru serta untuk meningkatkan profesionalitas. Dengan adanya rotasi jabatan ini maka

diharapkan para pegawai dapat mengembangkan kinerjanya dan dapat bekerja sama antar pegawai yang lainnya.

2) Pelatihan (Training) dan pendidikan

Pelatihan dan pendidikan tersebut diperlukan dengan beberapa alasan. Pertama, agar meningkatkan profesionalitas didalam melaksanakan tugas dengan keahlian yang dimiliki. Kedua, apabila sdm yang menempati suatu bidang tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya maka pelatihan ini diperlukan untuk menunjang kinerja pegawai. Ketiga, penyiapan sumber daya manusia sangat penting. Hal ini dilakukan untuk pemberdayaan karyawan.

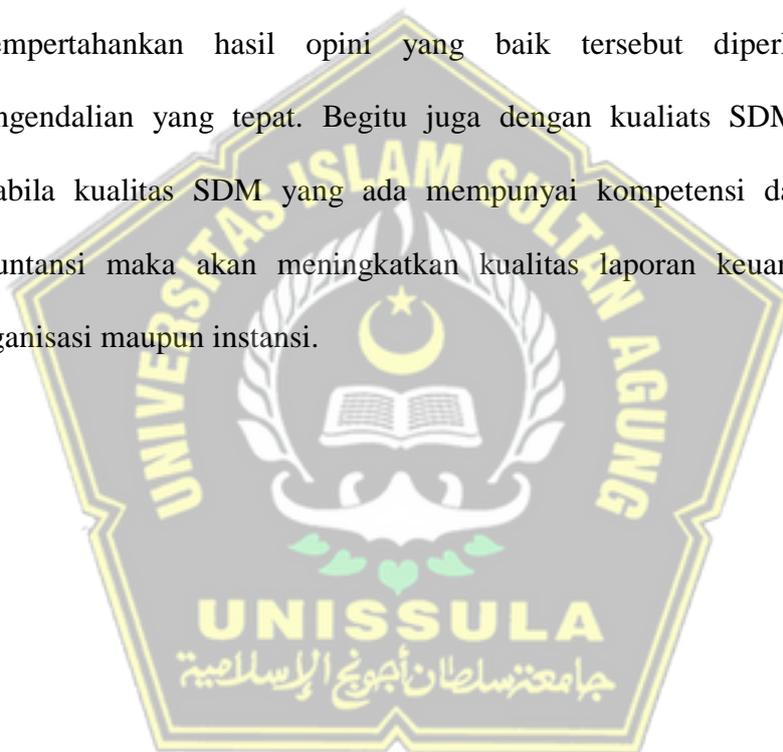
4.4 Hubungan SPI dan Kompetensi SDM pada Laporan Keuangan.

Dalam akuntansi, sistem pengendalian internal berperan membantu suatu organisasi atau instansi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, kompetensi SDM diperlukan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan.

Disamping itu, terdapat 5 dimensi sistem pengendalian internal menurut (Herawati, 2022) yang diantaranya *Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Informasi and Communication, Monitoring* yang mana memiliki indikator tersendiri untuk mencapai keberhasilannya. Dalam hal ini, unsur yang menjadi fondasi dalam pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan

pengendalian ini memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian internal.

Tidak terkecuali dalam bidang akuntansi, SPI harus benar-benar diperhatikan mengingat bahwa laporan keuangan yang dibuat digunakan sebagai pusat pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi maupun instansi yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK maka untuk mempertahankan hasil opini yang baik tersebut diperlukan suatu pengendalian yang tepat. Begitu juga dengan kualitas SDM yang ada, apabila kualitas SDM yang ada mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebuah organisasi maupun instansi.



BAB V

METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Sumber Data

Diperlukan nya data lengkap serta akurat untuk mendukung permasalahan yang dibahas dalam pembuatan laporan ini. Dengan begitu, terdapat dua sumber data yang digunakan.

1) Data Primer

Data primer ini didapat melalui observasi dan wawancara langsung dengan Ibu Diyah Winarni, SE.MM sebagai Kasubbag PEP dan Keuangan dan Ibu Nur Fauziyah, SE sebagai bendahara pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Wawancara tersebut mengenai permasalahan yang terjadi pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus dan cara Dinas dalam menanggapi permasalahan yang terjadi.

2) Data Sekunder

Di dalam data sekunder informasi data yang didapat berasal dari referensi-referensi dari jurnal dan buku, internet, serta dokumen yang dipublikasikan pada Website Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Data tersebut merupakan data pendukung yang membantu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang terkait.

5.2 Metoda Pengumpulan Data

Metoda Pengumpulan data ini terdiri dari metode obeservasi, wawancara, dan metode dokumenter yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan ini.

1) Metode Observasi

Metode observasi (pengamatan) ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan untuk memperoleh data atau informasi (Makbul, 2021). Metode pengumpulan ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bendahara pembantu maupun bendahara pengeluaran didalam melakukan aktivitas mengenai berbagai proses akuntansi di dinas seperti proses BIBS dan panjar tunai dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses akuntansi pada sektor publik.

2) Metode Wawancara

Metode wawancara diterapkan melalui wawancara langsung kepada bendahara pengeluaran dan kasubbag bagian PEP dan Keunangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus mengenai kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan atau sistem akuntansi, SDM yang ada serta sistem pengendalian yang dilakukan di dinas. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang menjadi topik peneliti.

3) Metode Dokumenter

Metode dokumenter merupakan suatu teknik di dalam memperoleh data melalui catatan atau dokumen yang ada dan telah dipublikasikan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

5.3 Analisis Data

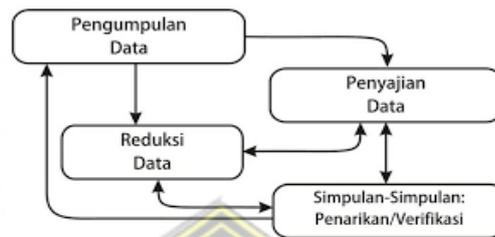
Metode analisis data dalam laporan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data melalui wawancara kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis, dijelaskan dan dikelola. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mensinergi dengan beberapa data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dipublikasikan. Ketika data telah terkumpul dengan melakukan analisis deskripsi kualitatif maka proses pengolahan dan penganalisisan data dapat dilakukan. Saat menganalisis data penyusunannya dilakukan secara induktif, memperhatikan setiap aturan individu sehingga dapat ditarik menjadi aturan (kaidah) umum.

Dengan menggunakan metode analisis kualitatif ini, penulis menjelaskan dan menganalisis secara detail hasil penelitian yaitu dampak adanya kegiatan pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia pada laporan keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

5.4 Teknik Analisis data

Analisis data kualitatif dapat diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda dengan menggunakan pengumpulan data (triangulasi) yang berbeda, dalam hal ini analisis data kualitatif menggunakan empat (4)

langkah yaitu mengumpulkan, memilah, menyajikan dan membuat kesimpulan dari data yang didapat. Berikut adalah ilustrasi analisis data kualitatif.



Gambar 5. 1 Alur Analisis Data Kualitatif

Penjelasan komponen-komponen analisis data yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- **Pengumpulan Data**

Metode observasi, wawancara, dan dokumenter ini digunakan dalam rangka pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan bukti yang sebenarnya.

- **Reduksi Data**

Untuk reduksi data, setiap data yang masuk diseleksi dari hasil pengumpulan data, kemudian semua data mentah diolah dan difokuskan agar lebih bermakna. Hal itu bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pengumpulan data oleh peneliti. Data tersebut diperoleh dari berbagai informasi di lapangan terkait SPI dan kompetensi SDM Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

- **Penyajian Data**

Dalam hal ini data disajikan secara sistematis dalam bentuk deskripsi dan tabel yang nantinya akan dibuat kesimpulan (verifikasi)

- **Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Kesimpulan ini dibuat setelah kegiatan analisis data di lapangan. Selain itu, kesimpulan ini harus didasarkan pada analisis data, serta catatan lapangan, pengamatan, dokumentasi dan informasi lain yang diperoleh dari studi lapangan.



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Analisis

Dalam bab analisis ini akan dijelaskan mengenai permasalahan yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

3.1.1 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern sangat penting dalam perkembangan operasional sebuah instansi pemerintahan. Dalam instansi pemerintahan sistem pengendalian intern ini dikenal dengan istilah “*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*”. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern dalam Dinas PUPR Kabupaten Kudus yaitu dengan melihat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yaitu dokumen yang memberikan gambaran tentang epektifitas manajemen risiko, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, peningkatan kontrol serta komunikasi dan pemantauan.

Pelaksanaan RTP dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kudus dengan berfokus pada pengendalian kegiatan pokok Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

**Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus**

Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kudus memiliki beberapa unsur-unsur pengendalian yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian Dinas PUPR Kabupaten Kudus dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Integritas dan Nilai Etika

Penciptaan integritas dan nilai etika Dinas PUPR Kabupaten Kudus dapat dilihat dalam 3 (tiga) hal yaitu: kepercayaan, komitmen, dan kinerja tinggi. **Sesuai hasil wawancara dengan Kasubbag PEP dan Keuangan.**

“Di sini, semua karyawan harus memahami terhadap nilai dan aturan Dinas. Nilai-nilai tersebut terdiri dari sebuah kepercayaan, komitmen, dan kinerja yang tinggi. Jadi, setiap tindakan atau aktivitas harus mengikuti nilai dan aturan yang ditetapkan. Peraturan tersebut telah dipasang di pintu masuk utama yang memungkinkan semua pegawai dapat melihatnya”.

2) Komitmen terhadap Kompetensi.

Dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Kudus dengan kondisi kurang memadai. Hal tersebut seperti yang diungkap dalam dokumen rencana tindak pengendalian sistem pengendalian internal pemerintahan di Dinas PUPR Kabupaten Kudus, seperti :

- a. Dalam pemenuhan tugas dan kewajiban negara, instansi tidak memiliki rencana strategis dalam memuat standar kompetensi SDM.
- b. Sumber daya manusia sangat kurang untuk implementasi dan perencanaan strategi;
- c. Berkaitan dengan kompetensi penilaian kinerja pegawai tidak pernah dilakukan

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang dimiliki Dinas PUPR Kabupaten Kudus secara umum sudah tersusun dengan baik. Tetapi ada beberapa pegawai yang terkadang lalai dalam menjalankan tugas nya. **Sesuai hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran dinas :**

“Menurut saya pembagian kerja telah dibentuk dengan baik, karena kita bisa melihat setiap

bagian pembagian kerja langsung dari *job description*. Tetapi memang masih ada beberapa pegawai yang terkadang menyepelekan tugas atau menunda pekerjaannya”.

b. Penilaian Risiko

Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam melakukan penilaian risiko yaitu melalui cerminan dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Kudus. **Sesuai hasil wawancara dengan**

Kasubbag PEP dan Keuangan :

“Pimpinan kami (dinas) melakukan analisis risiko dalam program yang akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran kas sebagai pedoman di dalam pengeluaran kas. Dengan melakukan analisis risiko ini kita (dinas) telah menyesuaikan dengan tujuan dan tingkat aktivitas instansi pemerintah dan kamu melakukan penilaian atas adanya faktor penambah risiko lainnya”.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian mencerminkan implementasi nyata dari kebijakan SPIP yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kudus. **Hal ini sesuai dengan pengungkapan Kasubbag PEP dan Keuangan :**

“Kami (dinas) dalam mereview kinerja pegawai yaitu dengan penyusunan LKjIP yang digunakan sebagai penilaian kinerja instansi pemerintah. Selain itu juga, kami (dinas) terkait SDM dalam penyusunan laporan keuangan pada bidang informasi teknologi ini, kami (dinas) telah memberikan pengetahuan kepada pegawai yang bertugas dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup proses perencanaan disesuaikan dengan ketentuan (standar operasional prosedur) yang berlaku”.

Sesuai dengan hasil wawancara bendahara pengeluaran dinas :

“Dalam kegiatan pengendalian ini juga telah menerapkan pemisahan fungsi tanggung jawab atas transaksi atau peristiwa dipisahkan antara karyawan yang berbeda dalam hal otorisasi, koordinasi, pemrosesan dan pencatatan pendanaan atau pembayaran tunai, serta penyimpanan dan

penanganan dana. Dengan begitu pegawai tidak diperbolehkan merangkap tugas yang berkaitan dengan transaksi atau pengeluaran kas yang terjadi, termasuk dalam mengendalikan aset”.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi terkait pelaksanaan SPIP oleh Dinas PUPR Kabupaten Kudus adalah proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan instansi.

Sesuai hasil wawancara dengan Kasubbag PEP dan Keuangan :

“Pimpinan dinas dalam hal pemberian informasi dan melakukan komunikasi melalui adanya kebijakan dan prosedur, surat edaran, situs web, email, dan instruksi lisan. Pimpinan instansi juga berkomunikasi dengan seluruh karyawan dalam bentuk tindakan positif dan mendukung pengendalian internal. Dalam mengelola informasi untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien, instansi memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti aplikasi SIMDA yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan”.

e. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)

Bentuk pemantauan atas pengendalian internal dalam Dinas PUPR Kabupaten Kudus sesuai **hasil wawancara dengan Kasubbag PEP dan Keuangan :**

“Kepala dinas, kabag, kasubbag, beserta auditor internal pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan dinas melakukan pemantauan pada sistem pengeluaran kas. Selain itu, dalam kegiatan pemantauan ini, kami (dinas) membandingkan catatan data pada sistem informasi dan keuangan dengan asset fisik. Untuk memperkuat pengendalian internal pimpinan instansi tanggap terkait temuan dan rekomendasi audit. Setelah itu melakukan pengendalian pelaksanaan RTP, setiap SKPD secara berkala melaporkan pelaksanaan RTP kepada kelompok pemantau di wilayah tanggung jawabnya. Setelah itu, hasil pemantauan kelompok pemantau dilaporkan ke Bupati Kudus”.

Sistem pengendalian internal berkaitan juga dengan sistem informasi keuangan, yaitu aplikasi SIMDA. Permasalahan yang sering terjadi yaitu dapat terlihat pada saat

aplikasi SIMDA mengalami eror atau tidak dapat digunakan dikarenakan jaringan internetnya kurang stabil. **Sesuai dengan wawancara kepada bendahara pengeluaran.**

“Untuk aplikasi keuangan ini dinas menggunakan aplikasi SIMDA tapi SIMDA ini terkadang tidak bisa digunakan. Pernah satu hari full tidak bisa digunakan karena internet nya bermasalah, itu sangat menghambat pekerjaan kami. Karena tidak bisa melakukan input data seperti melakukan panjar tunai ataupun proses BIBS. Akibatnya dalam proses penginputan laporan keuangan menjadi tertunda.

3.1.2 Dampak Pengendalian Internal pada Dinas PUPR Kab. Kudus

Dampak pengendalian internal pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus yaitu sebagai berikut :

1. Keandalan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus berpedoman pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, pegawai yang kompeten di bidang keuangan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan dengan selalu melakukan pengendalian internal dalam tugas dan tanggung jawabnya.

Tujuan laporan keuangan pemerintah yaitu sebagai alat informasi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk menentukan dan meramalkan kondisi keuangan pemerintah dan perubahan yang telah dan akan terjadi, memantau kinerja serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan undang-undang.

Dalam hal ini, keandalan dari Laporan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Kudus dapat terlihat dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk menyatakan pendapat atas keakuratan penyajian laporan keuangan, dengan memperhatikan kesesuaian dari laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan informasi yang dipublikasikan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Untuk proses audit dalam Dinas PUPR Kabupaten Kudus berdasarkan dengan hasil **wawancara dengan kasubbag bagian PEP dan Keuangan.**

“Opini itu diberikan oleh BPK kepada kabupaten. Tiap tahun kita (dinas) di audit oleh inspektorat dan BPK. Jadi kita (dinas) kirim data yang diminta oleh inspektorat dan BPK. Dari hasil pemeriksaan tersebut kami (dinas) mendapatkan opini WTP selama 5 tahun terakhir. Kalaupun ditemukan temuan kemudian

dikembalikan pada kita. Opini itu diberikan kepada kabupaten dengan hasil audit dari seluruh dinas oleh BPK”.

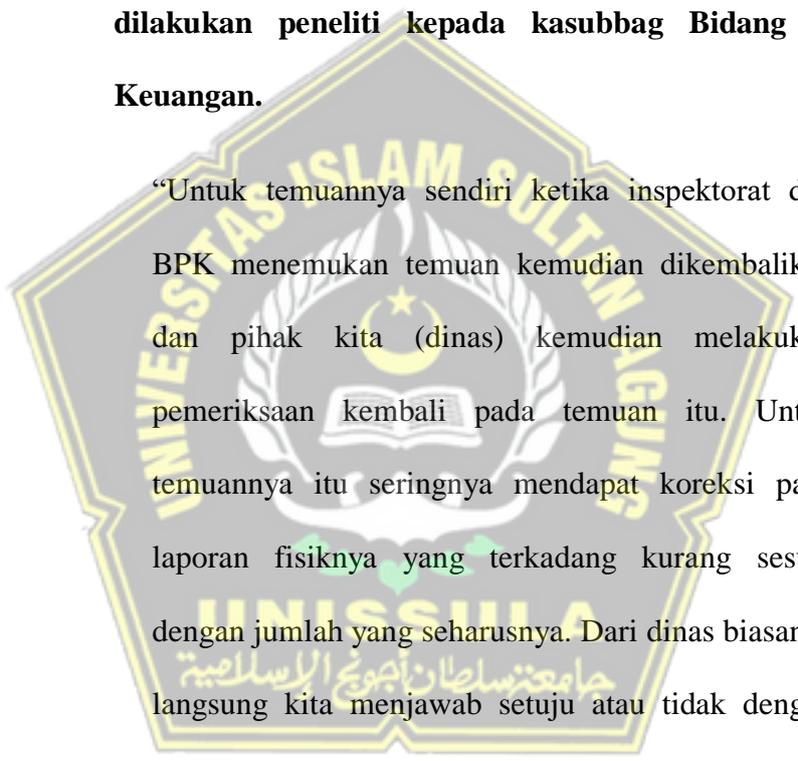
Tabel 6. 1 Hasil Opini Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2017-2012

Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	2021			Target Akhir	Capaian selama 5 tahun terakhir
	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian	2021	
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%

Walaupun hasil yang diperoleh mendapatkan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”** namun dalam hal ini masih adanya temuan yang harus diperbaiki, tetapi kesalahan tersebut tidak bersifat material. Sehingga tidak mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan. Temuan-temuan tersebut yaitu :

- 1) Penatausahaan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai, yaitu adanya perbedaan informasi atas luas tanah jalan berdasarkan SK Jalan Tahun 2015 dengan KIB A Dinas PUPR, terdapat bangunan yang dicatat dengan nilai tidak wajar dan belum tercatat di KIB C, Aset jalan untuk tambahan ruas jalan berdasarkan SK Jalan Tahun 2015 sebagian belum dicatat dalam KIB D dan jumlah jembatan yang berbeda dengan database jembatan.
- 2) Adanya beberapa aset yang belum didukung dengan bukti penyerahan aset secara tertulis, yaitu adanya aset sumur dan

jaringan air bersih yang berlokasi di masyarakat. Padahal bukti secara tertulis tersebut juga sangat penting karena didalamnya terdapat isi dokumen yang dirinci serta ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan untuk dijadikan bukti pertanggung jawaban dalam kepemilikan sebuah aset. Penjelasan mengenai temuan tersebut juga sesuai dengan **wawancara yang dilakukan peneliti kepada kasubbag Bidang PEP dan Keuangan.**



“Untuk temuannya sendiri ketika inspektorat dan BPK menemukan temuan kemudian dikembalikan dan pihak kita (dinas) kemudian melakukan pemeriksaan kembali pada temuan itu. Untuk temuannya itu seringkali mendapat koreksi pada laporan fisiknya yang terkadang kurang sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Dari dinas biasanya langsung kita menjawab setuju atau tidak dengan hasil temuan itu.

2. Pengamanan Aset Negara

Dalam hal ini sesuai dengan dokumen LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2021 bahwa pengamanan aset yaitu pada bangunan gedung. Kelengkapan administrasi menjamin

kepastian hukum dalam hal terjadi sengketa atau perlindungan hukum sehubungan dengan pemeriksaan perizinan.

Dalam hal pembangunan dan pemanfaatan gedung Dinas PUPR Kabupaten Kudus bekerja sama dengan BPMPTST Kabupaten Kudus untuk pelayanan rekomendasi perijinan pembangunan Target tahun 2021 sebesar 50% dan telah terealisasi sebesar 100% jadi Pelayanan rekomendasi perijinan pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2021.

**Tabel 6. 2 Pelayanan Perizinan Pembangunan
Kab. Kudus Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun		
		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Persentase pelayanan perijinan pembangunan yang sesuai standart	-	-	100%

Sumber : LKjIP Dinas PUPR Kab. Kudus 2021

3. Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Instansi Pemerintah

Dalam pelaksanaan pengendalian intern Dinas PUPR Kabupaten Kudus berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006. Sehingga Dinas PUPR Kabupaten Kudus dapat menjalankan tugas nya secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk menjamin kehandalan SPI yang ada, Dinas PUPR Kabupaten Kudus perlu menerapkan SPIP setiap tahunnya, diawali dengan identifikasi sasaran dan melakukan pemantauan

terhadap pelaksanaan pengendalian serta evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan SPIP melalui rencana tindak pengendalian dan mengetahui kondisi SPIP dinas.

4. Ketaatan dalam Peraturan Perundangan-Undangan

Dinas PUPR Kabupaten Kudus telah berusaha untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari **wawancara peneliti dengan kepada kasubbag PEP dan Keuangan.**

“Setiap yang kita (dinas) lakukan itu sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Karena dinas ini kan sebuah instansi pemerintahan jadi, setiap apa yang dilakukan itu berpedoman pada aturan perundang-undangan. Untuk penyelenggaran SPIP ini kita mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2006, dalam pengelolaan APBN kita (dinas) juga menggunakan SPI dan proses akuntansi sudah sesuai dengan SAP”.

6.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang dalam hal pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya di lingkungan kerja tempatnya bekerja.

Keterampilan staf akuntansi diperlukan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan.

Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan keuangan, Dinas PUPR Kabupaten Kudus didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 10 (sepuluh) pegawai yang mempunyai tugas sebagai bendahara.

Tabel 6. 3 Jenjang Pendidikan Bendahara Dinas PUPR Kudus

No	Uraian	Jenjang Pendidikan
1.	Bendahara Pengeluaran	S1 Akuntansi
2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu BM	SMA
3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu SDA	SMK
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat	SMK Akuntansi
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu PRP	D3 Management
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu TBD	SMA
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Wilayah I	SMA
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Wilayah II	STM
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu SAB	S1 Hukum
10.	Bendahara Gaji	SMA

Sumber Data: Dinas PUPR Kabupaten Kudus

Dari tabel yang telah disajikan, dapat terlihat bahwa terdapat keterbatasan dari Dinas PUPR Kabupaten Kudus ternyata kurang memperhatikan latar belakang pendidikan pegawainya, sehingga tidak semua pegawai yang menjadi bendahara lulusan ekonomi, khususnya akuntansi. Oleh karena itu, risiko yang mungkin masih ada adalah kesalahan dalam proses pencatatan atau identifikasi transaksi.

Keterbatasan tersebut dapat terlihat pada saat pegawai kurang teliti dalam menjalankan tugasnya, seperti kesalahan dalam proses penginputan kode digit rekening dalam melakukan proses tranfer ke bank. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi maka resiko yang timbul akibat kesalahan yang terjadi maka laporan keuangan menjadi tertunda.

“Terkadang kesalahan input kode rekening itu karena faktor terburu-buru dalam melakukan pekerjaan atau dapat dikatakan mepet deadline dan faktor kelalaian dari BPP. Kesalahan penginputan tersebut berakibat nilai nominal anggaran yang tersedia tidak tepat sasaran.. biasanya hal tersebut diketahui karena anggaran habis sebelum waktunya”.

**(Wawancara dengan bendahara pengeluaran Dinas
PUPR Kabupaten Kudus)**

Kemudian, kesalahan yang biasa terjadi yaitu bendahara pembantu per bidang mengalami keterlambatan dalam menyertakan kode billing (ID Billing) pajak ke bendahara pengeluaran dinas, hal tersebut yang nantinya akan menimbulkan keterlambatan dalam penyetoran pajak dikarenakan tidak dapat menginput data ke SIMDA untuk proses pembayaran pajaknya.

“Keterlambatan bukti pajak itu biasanya terjadi karena BPP tidak segera membayarkan pajak dari belanja tunai, BPP lalai atau kelupaan. Akibat dari keterlambatan pembayaran pajak tersebut dapat mempengaruhi terhadap pengajuan GU sehingga menjadi terlambat juga. Pengajuan GU ini biasanya dilakukan dalam rangka mengisi kembali uang persediaan”.

**(Wawancara dengan bendahara pengeluaran Dinas
PUPR Kabupaten Kudus)**

Selain itu, keterlambatan dapat terlihat juga pada saat BPP terlambat didalam menyerahkan Buku Kas Umum (BKU) ke bendahara pengeluaran. Akibat dari keterlambatan tersebut dalam memproses Uang Persediaan (UP) menjadi tertunda.

“Untuk yang permasalahan mengenai BKU ini, keterlambatan penyerahan BKU karena BPP tidak

langsung membukukan setiap transaksi yang terjadi pada saat yang sama. Biasanya cenderung menunda pekerjaan. Hal itu juga yang menjadikan proses penyajian laporan untuk pengajuan GU terlambat juga”.

(Wawancara dengan bendahara pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Kudus)

Uang Persediaan (UP) sangat penting dalam sebuah instansi pemerintahan dikarenakan Uang Persediaan (UP) merupakan sumber modal bagi setiap perangkat daerah. Resiko yang terjadi apabila UP tersebut tertunda maka menjadikan proses operasional instansi menjadi tertunda atau mengalami keterlambatan.

6.2 Pembahasan

6.2.1 Identifikasi Penyelesaian

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam penyelesaian mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus, yaitu melakukan identifikasi dan analisa permasalahan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Penyelesaian atas permasalahan yang ada ditujukan untuk menetapkan strategi guna memperkecil dampak yang terjadi dalam kegiatan operasional pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Bentuk penyelesaian tersebut difokuskan terhadap beberapa temuan pada hasil

opini BPK dan strategi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia terutama dibagian akuntansi.

6.2.2 Strategi Penyelesaian

a. Sistem Pengendalian Internal

Pengelolaan aset tetap merupakan fungsi yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset sesuai ketentuan yang berlaku. Penatausahaan atau pengelolaan kekayaan tersebut menciptakan ketertiban dalam pengelolaan kekayaan negara/wilayah.

Apabila didalam proses pengelolaan atau penatausahaan aset ini terdapat perbedaan informasi antara ketentuan yang sudah ada dengan kondisi di lapangan dan terdapat aset yang belum dicatat maka harus segera ditandaklanjuti dikarenakan aset yang merupakan Barang Milik daerah (BMD) ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, saran yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Kudus yang berkaitan dengan penatausahaan aset adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 4 Strategi mengatasi permasalahan terkait SPI

Uraian	Target	Terealisasi
Melakukan kegiatan penatausahaan aset meliputi : 1. Mencatat BMN kedalam buku barang 2. Melakuakn pencatatan setiap mutasi BMN 3. Mencatat adanya perubahan dan perpindahan kondisi barang 4. Mencatat PNBP dari pengelolaan BMN	100 %	85 %
Perbarui catatan KIB berdasarkan data teknis yang ada untuk mendukung keakuratan aset dalam dalam laporan keuangan.	100 %	75 %
Pemeliharaan jaringan internet	100 %	75 %

Dengan melihat pencapaian dalam melakukan kegiatan penatausahaan aset pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam hal ini capaian kinerja yang dilakukan cukup baik. Walaupun demikian agar mencapai target yang telah ditentukan maka hal yang dilakukan untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan penatausahaan aset yaitu diperlukan kerjasama yang solid antara pengelola kegiatan dan mengoptimalkan koordinasi antara pelaksana kegiatan. Sehingga dalam melakukan penatausahaan aset dan proses pemuktakhiran dapat terlaksana dengan lebih baik lagi dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian

meningkatkan pemeliharaan secara berkala terhadap jaringan internet.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Seiring dengan tuntutan global akan keahlian bisnis, khususnya dalam manajemen SDM, hal ini menunjukkan bahwa kinerja seorang karyawan dapat optimal jika karyawan tersebut memiliki keahlian yang handal di bidangnya.

Keandalan kompetensi SDM sebenarnya dapat terbentuk dibentuk ketika proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membimbing anggotanya untuk mendiversifikasikan kompetensi masing-masing, seperti: 1) kesesuaian untuk pencapaian tujuan; 2) kemampuan memecahkan masalah; 3) keterampilan interpersonal; 4) mampu bekerja dalam tim.

Dengan begitu, SDM dalam sebuah perusahaan, organisasi maupun instansi harus mendapat perhatian yang lebih, khususnya SDM yang mempunyai tugas dalam urusan keuangan yang mejadi hal paling penting atau krusial untuk diperhatikan. Mengingat perusahaan, organisasi, ataupun instansi dapat dianggap baik ketika laporan keuangan yang dihasilkan dalam kondisi yang baik juga.

Dinas PUPR Kabupaten Kudus, untuk mengelola keuangan dibantu dengan adanya bendahara pengeluaran dan bendahara

pembantu pengeluaran untuk masing-masing bidang di Dinas PUPR Kabupaten Kudus.

Dengan begitu bendahara tersebut harus memiliki kinerja yang baik untuk membuat laporan keuangan, karena laporan keuangan yang baik bukan hanya dilihat dari susunan palaporan yang sesuai tapi juga dari ketepatan waktu dalam melaporkannya juga perlu diperhatikan.

Dengan demikian, saran yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Dinas PUPR yang berkaitan dengan sumber daya manusia nya adalah sebagai berikut :

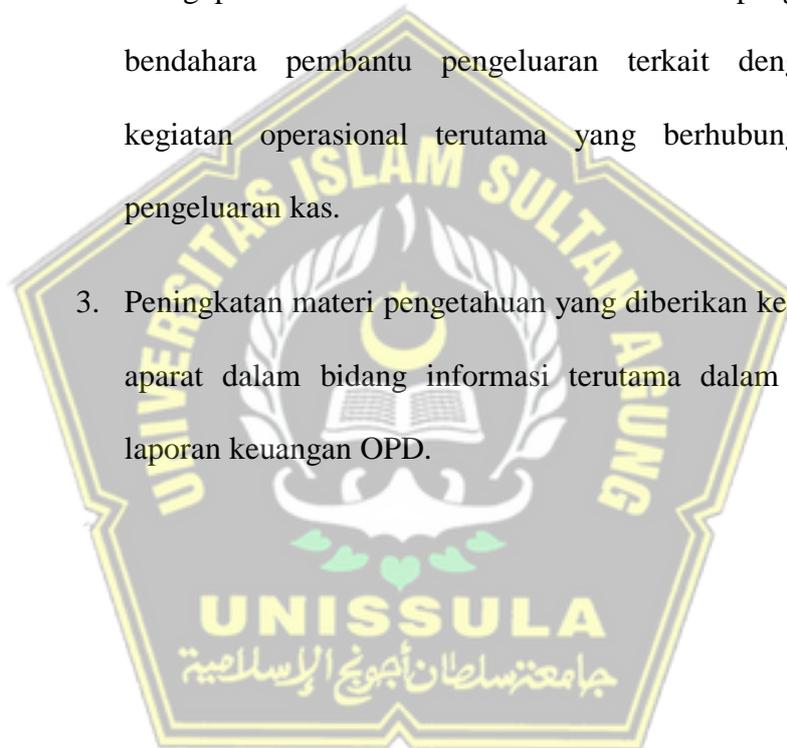
Tabel 6. 5 Strategi mengatasi permasalahan terkait SDM

Uraian	Target	Terealisasi
Pengecekan kembali data yang akan di upload sebelum melakukan proses transfer ke bank.	100 %	80 %
Pembagian jobs description antar pegawai.	100 %	90 %
Komunikasi antara bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu pengeluaran.	100 %	75 %
Kegiatan pelatihan (diklat) dan seminar untuk pegawai dalam bidang informasi dan teknologi	100 %	80 %

Dalam tabel tersebut dapat terlihat bahwa capaian kinerja yang dilakukan cukup baik. Untuk mencapai target yangtelah ditentukan, maka kinerja pegawai lebih ditingkatkan lagi. Untuk

mendorong peningkatan kinerja pegawai maka pengendalian yang masih harus diperlukan yaitu :

1. Pembuatan laporan harian – bulanan – tahunan atau juga dapat melakukan pembukuan langsung setiap transaksi yang terjadi pada saat yang sama.
2. Mengoptimalkan koordinasi antara bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu pengeluaran terkait dengan adanya kegiatan operasional terutama yang berhubungan dengan pengeluaran kas.
3. Peningkatan materi pengetahuan yang diberikan kepada seluruh aparat dalam bidang informasi terutama dalam penyusunan laporan keuangan OPD.



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas PUPR Kabupaten Kudus, dan pembahasan yang dipaparkan mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah Dinas PUPR Kabupaten Kudus, penulis menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.

Hal ini ditunjang dengan penerapan 5 unsur pengendalian. Untuk lingkungan pengendalian nya sudah cukup baik, tetapi masih kurang didalam komitmen terhadap kompetensinya. Pimpinan instansi kemudian melakukan penilaian risiko yang disesuaikan dengan tujuan instansi pemerintah dan menilai serta menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko.

Selanjutnya dalam kegiatan pengendalian ini Dinas PUPR Kabupaten Kudus menyusun LKjIP guna melakukan penilaian kinerja instansi pemerintah dan melakukan pemisahan fungsi yang dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan atau ketidaksesuain. Mengenai informasi dan komunikasi pimpinan Instansi menggunakan dan mengkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Berkaitan dengan terkonlogi informasinya Dinas PUPR Kabupaten Kudus memanfaatkan teknologi yang

ada untuk menunjang kegiatan Akuntansi yaitu menggunakan aplikasi SIMDA.

Selanjutnya dalam hal pemantauan (monitoring) Dinas PUPR Kabupaten Kudus telah melakukan pemantauan terhadap pengeluaran kas dalam pengambilan keputusan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP (Rencana Tindak Pengendalian). Dengan begitu dari adanya pelaksanaan SPIP ini memiliki dampak pada keandalan laporan keuangan, yaitu BPK memberikan opini WTP.

Namun demikian, dalam hal ini juga terdapat keterbatasan pada Dinas PUPR Kabupaten Kudus yaitu kurang memperhatikan latar belakang pegawai. Tidak semua pegawai yang bertugas sebagai bendahara dalam tugas pokok seperti kegiatan administrasi, penganggaran dan perencanaan lulusan ekonomi, khususnya akuntansi. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa kesalahan seperti dalam pencatatan atau identifikasi transaksi.

7.2 Rekomendasi

7.2.1 Rekomendasi Hasil Analisis

Dinas PUPR Kabupaten Kudus harus tetap mempertahankan opini WTP. Opini WTP dimaknai sebagai hal yang sangat penting, karena tidak hanya menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam keseriusan Dinas PUPR kabupaten Kudus sebagai pengelola keuangan, tetapi juga mendukung transparansi keuangan

dan tanggung jawab keuangan. Hal ini juga akan berpengaruh pada Pemerintahan Kabupaten Kudus.

Untuk dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi, diharapkan kepada satgas SPIP Dinas PUPR Kabupaten Kudus melakukan pengembangan lebih lanjut pada sistem pengendalian intern sehingga kualitas laporan keuangan sendiri selalu baik. Selain itu, kepada pihak bendahara umum dinas agar melakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang mengatur penyajian laporan keuangan.

Untuk menjamin terelenggaranya pengelolaan Dinas PUPR Kabupaten Kudus dengan baik, setiap peraturan atau mekanisme administrasi dinas tersebut harus diikuti dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Jika muncul masalah, harus segera ditindaklanjuti.

Selain itu, teknologi informasi yang digunakan dalam hal akuntansi seperti SIMDA, dalam pengendaliannya juga perlu diperhatikan, baik dalam hal efektivitas biaya, kenadalan program, kemudahan penggunaan dan pemeliharaan sistem. Karena hal tersebut berkaitan dengan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kemudian didalam pengembangan SDM diharapkan Dinas Pekerjaan PUPR Kabupaten Kudus melaksanakan program pelatihan

secara rutin dan berkesinambungan untuk pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing, khususnya pegawai yang memiliki jabatan sebagai bendahara. Sehingga setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih andal dan dapat memberikan pelayanan dengan baik.

7.2.2 Hal-hal yang Perlu Diperbaiki Organisasi Tempat Magang

Selama magang berlangsung Di Dinas PUPR Kabupaten Kudus peserta magang tentu mengamati terkait apa saja yang ada lingkungan peserta magang tersebut. Tentu ada beberapa hal yang hanya bisa didapat di tempat magang dan tidak bisa didapat pada saat perkuliahan berlangsung. Namun, masih banyak hal yang perlu diperbaiki organisasi tempat magang, seperti :

- 1) Meningkatkan batas informasi yang ingin diketahui peserta magang. Seperti website organisasi tempat magang yang masih terbatas informasinya. Karena selain melakukan interaksi secara langsung dengan pegawai untuk menggali informasi. Adanya website organisasi juga sangat penting untuk menunjang informasi yang dibutuhkan.
- 2) Diharapkan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kudus terus menjaga dan meningkatkan kedisiplinan serta kinerja pegawai yang ada saat ini agar sesuai dengan harapan dinas.

- 3) Dinas PUPR Kabupaten Kudus, diharapkan dapat memupuk hubungan yang baik dengan lembaga pendidikan, yaitu untuk tetap bersedia menerima mahasiswa dan tetap terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk meningkatkan pembangunan daerah.

7.2.3 Hal-hal yang Perlu Diperbaiki oleh Program Studi

Di program magang MBKM ini mahasiswa tidak bisa terlepas dari fakultas. Hal tersebut dikarenakan, fakultaslah yang menjembatani kita dengan tempat magang. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh fakultas atau program studi :

- 1) Ketika menyampaikan informasi terkait program magang MBKM, diharapkan fakultas jangan rancu dan mendadak ketika penyampaian informasi tersebut. Sehingga mahasiswa dapat mudah memahaminya tanpa perlu bertanya berulang kali dan dapat melakukan persiapan dengan baik.
- 2) Membekali pengetahuan yang diperlukan ketika magang kepada mahasiswa maupun DPL.
- 3) Sebagai jembatan antara mahasiswa terkait dengan tempat magang, maka fakultas atau program studi jangan sampai miskomunikasi dengan organisasi tempat magang.

BAB VIII

REFLEKSI DIRI

8.1 Hal Positif Selama Perkuliahan yang Bermanfaat Selama Magang

Selama 5 bulan dalam pelaksanaan kegiatan magang di Dinas PUPR Kabupaten Kudus, hal positif yang saya dapatkan yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan sekaligus pengalaman kerja yang sesuai dengan studi yang saya tempuh saat ini. Pendidikan dan akhlak islami yang saya terima selama kuliah sangat berguna dalam melakukan komunikasi dengan baik dan santun kepada seluruh pegawai di kantor

8.2 Manfaat Magang Terhadap Pengembangan Softskill Mahasiswa

Kegiatan magang di Dinas PUPR Kabupaten Kudus memberikan saya banyak sekali pengembangan *soft skill*. Dalam hal ini, selama magang berlangsung saya dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Selama magang, melalui berbagai kesempatan yang ada, saya menyadari bahwa ada beberapa hal yang harus ditingkatkan berkaitan dengan kekurangan yang ada seperti terkadang kurang teliti dalam pelaksanaan tugas. Hal yang saya lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan selalu mengecek pekerjaan saya.

8.3 Manfaat Magang Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Kemampuan kognitif yang dapat dikembangkan, seperti kemampuan berpikir logis dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan begitu, hal ini sangat

berguna untuk menganalisis masalah yang ada di pekerjaan. Sehingga nantinya dapat dicari solusi terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan.

Saya juga belajar untuk memperhatikan dan fokus selama proses magang. Dulu, saya sering kurang fokus pada apa yang sedang di bahas dalam proses perkuliahan, yang berujung ditanggung oleh saya sendiri. Dalam proses magang, saya mencoba berkonsentrasi. Karena jika saya melakukan kesalahan, itu tidak hanya mempengaruhi saya, tetapi juga pekerjaan saya.

8.4 Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang

Salah satu pelajaran yang saya dapat dari kegiatan magang adalah kunci sukses di tempat kerja. Untuk berhasil dalam pekerjaan diperlukan rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukan, seperti kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, pekerjaan akan selesai tepat waktu dan mencapai hasil yang telah direncanakan.

8.5 Rencana Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan Mahasiswa

Di dalam pengembangan diri, saya melakukan kegiatan seperti pelatihan microsoft, terutama microsoft excel yang berguna untuk seorang akuntan dan digital marketing. Saya memupuk kemampuan ini untuk mendukung cita-cita saya sebagai seorang akuntan dan entrepreneur

DAFTAR REFERENSI

- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 1855–1869.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>.
- Ayem, S., & Nugroho, M. M. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik, Tingkat Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 27-40.
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19-39.
- Gasperz, J. J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem

Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)*, 5(2), 75-83.

Herawati, T. (2022). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (Survei pada organisasi perangkat daerah pemda Cianjur). *STAR*, 11(1), 1-14.

Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1-16.

Iqbal, M., Sofwan, S. V., & Mariam, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 13(1), 1-15.

Iriawan, H. (2021). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 131-137.

Isnaen, F., & Albastiah, F. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wilayah Jakarta Barat). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1), 55-73.

Kurniawan, I. S. (2019). Kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. *KINERJA*, 16(2), 160-165.

Lutfiati, D., Kapuri, N. I. C., Amalia, Z., & Prawira, I. F. A. (2021). Urgensi Financial Reporting Quality Sektor Publik Dan Privat Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(2), 163-180.

Makbul, M. (2021). Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Merina, C. I., & Rahmawati, D. (2021). Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. In *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)* (pp. 1479-1498).

Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 151. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692>

Rizka S, A., Zamzami, Z., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal*

Akuntansi & Keuangan Unja, 6(3), 136–148.

Sholohah, S. A. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45-56.

Sudarmanto, E., Krisnawati, A., Purba, S., Revida, E., Kadar, M. G., Yasmi, Y., ... & Yendrianof, D. (2021). *Sistem Pengendalian Internal*. Yayasan Kita Menulis.

Triono, S. &. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. pp. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 213-220.

Yanto, E., & Afkir, M. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli). *Indonesian Journal of Strategic Management*, 3(1).

Map.uma.ac.id. 2020. Apa Itu Laporan Keuangan Sektor Publik. URL : <http://map.uma.ac.id/2020/10/apa-itu-laporan-keuangan-sektor-publik/>. Diakses tanggal 27 Mei 2022.

Diskominfo.kuduskab.go.id. 2022. Raih WTP Sepuluh Kali Berturut Hartopo Sebagai Pelecut Semangat Perbaiki Birokrasi URL: <https://diskominfo.kuduskab.go.id/portal/berita/id/raih-wtp-sepuluh-kali-berturut-hartopo--sebagai-pelecut-semangat-perbaiki-birokrasi->. Diakses

tanggal 28 Juni 2022

www.bpk.go.id. Laporan Keuangan yang Berkualitas Tinggi diperlukan untuk Menjaga Perekonomian yang efisien dan Berkelanjutan. URL: <https://www.bpk.go.id/news/laporan-keuangan-yang-berkualitas-tinggi-di-perlukan-untuk-menjaga-perekonomian-yang-efisien-dan-berkelanjutan>.

Diakses tanggal 12 Juli 2022.

